

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPTPD

Mulai Januari, Paling Lambat Tanggal 10 Setiap Bulan

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman melakukan beberapa perubahan kebijakan terkait mekanisme pembayaran pajak daerah berdasarkan regulasi terbaru. Yakni Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Regulasi itu diperjelas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB).

"Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang HKPD mengamanatkan bahwa pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) saat ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Ketentuan tersebut berlaku per Januari 2024.

Adapun keterlambatan atas kewajiban tersebut berupa sanksi administrasi 1 persen," ungkap Kepala Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Haris Sutarta di Sleman, Senin (8/1). Untuk kelancaran pe-

laksanaan pelaporan serta pembayaran pajak daerah, para wajib pajak diimbau melakukan penyesuaian. "Teknis pelaksanaan pembayaran dan pelaporan SPTPD lebih lanjut diatur dengan peraturan daerah dan peraturan bupati. Sosialisasi kepada wajib



KR-Istimewa

Haris Sutarta

pajak kami lakukan secara bertahap," jelasnya. Haris berharap, dari so-

sialisasi tersebut para wajib pajak di Sleman bisa memahami apa saja aturan baru atau perubahan ketentuan terkait mekanisme pembayaran pajak dan retribusi. Sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dari sektor pajak tetap optimal.

Diungkapkan pula perbedaan tentang jenis pajak berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRB dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Masing-masing

menjelaskan tentang pajak yang dipungut berdasarkan penetapan dan yang bisa dihitung dan dilaporkan serta dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Merujuk regulasi lama (UU 28/2009), pajak yang dipungut berdasarkan penetapan, antara lain, air tanah, reklame, dan PBB-P2. Sedangkan pajak yang bisa dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan oleh wajib pajak sendiri, di antaranya, pajak hotel, restoran, hiburan, PPJ, MBLB, parkir,

dan BPHTB.

"Sementara itu, UU No 1/2022 mengatur jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan adalah PBB-P2, reklame, PAT, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Sedangkan pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak, antara lain, BPHTB, PB-JT atas makan/minum (restoran), perhotelan, parkir, tenaga listrik, serta kesenian dan hiburan. Juga MBLB," pungkasharis. (Has)-d

DISPAR SLEMAN SIAPKAN 110 EVENT

Tahun 2024 Targetkan 7 Juta Kunjungan

SLEMAN (KR) - Dinas Pariwisata Sleman menetapkan target kunjungan wisatawan pada 2024 ini tidak jauh berbeda dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 7.000.000 kunjungan. Sedangkan besaran belanja wisatawan nusantara antara Rp 1.400.000 - Rp 1.600.000, dan besaran belanja wisatawan mancanegara sebesar USD 300 - USD 350.

"Kami menargetkan rerata lama tinggal atau *length of stay* wisatawan nusantara di hotel berbintang dan nonbintang antara 1,75 - 1,90 hari. Sementara rerata *length of stay* wisatawan mancanegara di hotel berbintang dan nonbintang antara 2,10 - 2,25 hari," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Sleman Ishadi Zayid kepada wartawan, kemarin.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pariwisata Sleman telah menyiapkan strategi pencapaian. Di antaranya kegiatan promosi pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung (dengan memanfaatkan media online) menjadi kunci dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut di atas.

"Paparasi besar belanja wisatawan

(wisnus dan wisman) di atas menunjukkan bahwa promosi pariwisata tidak bisa hanya dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi semata. Keikutsertaan dalam pameran pariwisata skala nasional dan internasional, pelaksanaan travel dialog dan table top tetap diperlukan mengingat *tourism is about trust*," jelas Zayid.

Dikatakan pula, event merupakan motor penggerak utama pariwisata, khususnya di Kabupaten Sleman. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Sleman akan meluncurkan Calendar of Event 2024 pada awal 2024 mendatang. Terdapat total 110 event skala lokal, nasional dan internasional yang akan dilaksanakan selama 2024. Seperti Tour de Ambarukmo, Ambarukmo Volcano Run, UGM Trail Run, Sleman Temple Run, Bedog Art Festival dan Prambanan Jazz. "Kerja sama pentahelix yang sudah ada akan lebih dikuatkan karena pembangunan pariwisata bukan hanya menjadi tugas pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata semata, namun seluruh pihak terkait," tambah Zayid. (Has)-d

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dewan Dorong Program Pemberdayaan Terus Digenjot

SLEMAN (KR) - Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta SIP mendorong program pemberdayaan masyarakat perlu digenjot. Dengan tujuan program pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Haris Sugiharta, Pemkab Sleman memiliki banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya. "Kami mendorong program pemberdayaan masyarakat terus digenjot. Tidak hanya jumlah programnya, tapi pendistribusian atau masyarakat yang mengakses juga perlu diperbanyak," kata Haris Sugiharta di Sleman, Senin (8/1).

Dikatakan, sampai saat ini dirinya telah menyalurkan program pemberdayaan masyarakat cukup banyak. Di antaranya pelatihan budidaya kambing, katering bagi ibu-ibu, budidaya ikan, digital marketing, sarpras olahraga dan lainnya. Program tersebut melalui Pokok Pikiran Dewan (Pikiran) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

"Jadi program itu bisa diakses

melalui dana BKK maupun pokir. Harapan kami masyarakat atau kelompok masyarakat bisa mengakses program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan atau bidang yang diinginkan," terangnya.

Program pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya meningkatkan keterampilan saja. Namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan ma-

sarakat karena bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran. "Ketika masyarakat sudah memiliki keterampilan, harapannya dapat mandiri secara ekonomi. Bahkan nanti dapat membuka peluang sudah yang dapat mengurangi pengangguran sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasharis. (Sni)-d



KR-Istimewa

Haris menyerahkan bantuan program pemberdayaan masyarakat.

DORONG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

1.535 Posyandu Terima Antropometri Kit



KR-Istimewa

Bupati Kustini secara simbolis menyerahkan Antropometri Kit kepada sejumlah kader Posyandu.

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menyalurkan bantuan Antropometri Kit kepada 1.535 Posyandu. Penyaluran Antropometri Kit ini dimaksudkan untuk mendukung layanan di tingkat Posyandu yang diajarkan kepada Kementerian Kesehatan RI oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

"Saat ini Posyandu diarahkan untuk menyediakan layanan terstandar bagi masyarakat berbasis siklus hidup mulai dari ibu hamil, bayi balita, anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia dewasa dan usia lansia. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan

di Posyandu, diperlukan variasi alat untuk melakukan pengukuran khususnya pada sasaran bayi dan Balita (Antropometri Kit)," jelas Kepala Dinkes Sleman Cahya Purnama di Sleman, Senin (8/1).

Dijelaskan Cahya, Antropometri Kit ini merupakan alat pengukur pertumbuhan tubuh bayi atau balita sebagai indikasi mengetahui asupan gizi pada anak.

Dengan keberadaan Antropometri Kit ini, Pemkab Sleman dan seluruh pengelola Posyandu akan semakin kuat dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sleman. (Has)-d

Bupati Sleman Kustini menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader Posyandu di Kabupaten Sleman. Atas dedikasinya, peran Posyandu khususnya di wilayah Sleman menjadi perhatian Pemerintah Pusat sehingga menjadi salah satu Kabupaten yang mendapat bantuan Antropometri Kit.

"Selain dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Posyandu, pemenuhan peralatan di Posyandu diharapkan dapat menjadi motivasi dalam memberikan layanan di masyarakat. Posyandu yang aktif didukung kelengkapan alat dan kader dengan keterampilan dasar semakin mempercepat terwujudnya Posyandu sebagai *centre of excellence*," ujar Bupati.

Ditambahkan, Antropometri Kit ini berfungsi untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala. Sehingga dapat mempermudah dalam memantau perkembangan setiap balita yang ada di Kabupaten Sleman. (Has)-d

ALOKASI UNTUK 86 KALURAHAN SEBESAR RP 123 M

BLT Dana Desa Masih Tetap Disalurkan

SLEMAN (KR) - Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa dipastikan masih dilanjutkan di tahun ini. Adapun besaran bantuan Rp 300.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat.

Sub Koordinator Keuangan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman Ratnaningsih mengatakan, alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diterima untuk 86 kalurahan sebesar Rp 123,08 miliar. Jumlah ini lebih banyak ketimbang alokasi di 2023 sebesar Rp 121,7 miliar. "Untuk penggunaan sudah ada petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Rencananya, pagu ini dipergunakan untuk program prioritas di kalurahan seperti penyaluran BLT, ketahanan pangan, penanganan stunting dan pemberdayaan BUMDes. Empat program ini menjadi prioritas. Setelahnya, baru dipergunakan untuk urusan lain di setiap kalurahan," kata Ratna kepada wartawan, belum lama ini.

Untuk penyaluran BLT Dana Desa sudah dilaksanakan sejak adanya pandemi Covid-19. Untuk porsi alokasi untuk tahun ini lebih

longgar dikarenakan maksimal pagu yang disediakan sebesar 25% dari dana desa yang diterima. "Jadi boleh mengalokasikan 5%, 10% karena yang terpenting tidak melebihi 25%. Kalau tahun lalu, alokasinya ditetapkan antara 10-25% dari dana desa yang diterima," tambah Ratna.

Sedangkan Lurah Taman Martani Kalasan Gandang Hardjanata mengaku sudah mendapatkan alokasi Dana Desa dari APBN di 2024. Total pagu yang diterima di tahun ini sebesar Rp 1,4 miliar. Pemanfaatan sudah ada pedoman dari Pemerintah Pusat. Salah satunya digunakan untuk penyaluran BLT Dana Desa sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. "Penyaluran ini sudah ditetapkan sebanyak 25 penerima yang berasal dari keluarga miskin ekstrem di Kalurahan Tamanmartani. Setiap bulannya mendapat bantuan Rp 300.000 yang diberikan selama satu tahun. Jadi total yang kami alokasikan sebesar Rp 90 juta dan ini sudah sesuai dengan ketentuan untuk alokasi BLT Dana Desa yang ditetapkan Pemerintah Pusat," katanya. (Has)-d

Kedaulatan Rakyat EPAPER

www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggaman tangan Anda. Sekarang.